

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan Publik sangatlah dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, karena tugas dari akuntan publik yaitu memeriksa dan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna internal maupun eksternal. Perusahaan juga harus berhati-hati dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangannya. Akuntan Publik akan memberikan informasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dari informasi yang didapatkan mengenai kewajaran suatu laporan keuangan maka pengguna laporan keuangan akan terbantu dalam pengambilan keputusan.

Sebagai seorang akuntan publik haruslah berpedoman kepada standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit tersebut yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain menjalankan ketiga standar tersebut seorang auditor pun harus menaati kode etik profesi yang mengatur akuntan publik atau auditor dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Standar dan kode etik tersebut harus dilakukan oleh setiap akuntan publik atau auditor karena dengan dijalankannya standar dan kode etik tersebut maka akan terlihat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Oleh karena itu akuntan publik harus menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut De Anggelo dalam Kusharyanti (2003) dan Mutiara (2014)

mendefinisikan bahwa kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Berkualitas atau tidaknya suatu pekerjaan auditor akan mempengaruhi hasil auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan, sehingga auditor dituntut agar bertanggungjawab dalam setiap pekerjaannya dan bersikap profesional serta mempunyai integritas yang tinggi. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing, kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan (Rahmat Febrianto, 2009).

Tetapi pada akhir-akhir ini kualitas audit menjadi sorotan bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan dengan mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan dari jasa akuntan publik. Fenomena yang pernah terjadi yaitu kasus Enron Corp yang menyeret KAP Arthur Anderson pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Kejatuhan Enron bermula dari dibukanya *partnerships* yang bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron. *Partnerships* yang diberi nama “*Special Purpose Vehicle*” memang memiliki karakteristik yang istimewa. Secara hukum perusahaan di Amerika, apabila induk perusahaan berpartisipasi dalam *partnership* di mana partner dagang menyumbang sedikitnya 3% dari modal keseluruhan, maka neraca *partnership* ini tidak perlu dikonsolidasi dengan neraca dari induk perusahaan. Enron membiayai dengan meminjamkan saham Enron (induk perusahaan) kepada Enron (anak perusahaan) sebagai modal dasar

partnership tersebut, tetapi Enron tidak pernah mengungkapkan operasi dari *partnership* tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham dan *Security Exchange Commission* (SEC) badan tertinggi pengawasan perusahaan publik di Amerika. Enron bahkan memindahkan utang-utang sebesar \$ 690 juta yang ditimbulkan induk perusahaan ke *partnership* tersebut. Dan juga Enron telah melebih-lebihkan laba mereka sebanyak \$ 650 juta (Prima Yulivani, 2013)

KAP Arthur Anderson telah mengaudit sejak tahun 1985 dan selalu memberikan opini wajar tanpa pengecualian sampai tahun 2000. Dengan berperan sebagai auditor merangkap konsultan manajemen. Arthur Anderson menerima *fee double* yaitu dari konsultasi menerima US\$ 27 juta dan dari jasa audit mendapat US\$ 25 juta. Pada September 2001, pemerintah mulai mengamati adanya ketidakberesan dalam laporan pembukuan Enron. Satu bulan kemudian, Enron mengumumkan kerugian sebesar \$ 600 juta dan nilai aset Enron menyusut \$1,2 triliun. Dari kebangkrutan Enron menyeret nama KAP Arthur Anderson, karena peristiwa penghancuran dokumen yang dilakukan oleh David Duncan, ketua *partner* dari Arthur Anderson untuk Enron. Panik karena menerima undangan untuk diminta kesaksiannya di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, Duncan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan ratusan kertas kerja dan *e-mail* yang berhubungan dengan Enron. Peristiwa penghancuran dokumen ini memberi keyakinan pada publik dan kongres bahwa Arthur Anderson sebenarnya mengetahui bisnis buruk dari Enron, tetapi tidak mau mengungkapkannya dalam

laporan audit mereka karena takut kehilangan Enron sebagai klien (Prima Yulivani, 2013)

Selain itu terdapat fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas audit, yakni seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh

akuntan publik. Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya. Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontasi tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut.

Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effendi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit. (Imelda Setiawati, 2010)

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, salah satunya yaitu biaya audit atau *fee* audit. Seorang auditor tentu bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. Biaya audit atau *fee* audit merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada auditor untuk melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan kewajaran laporan keuangan kliennya. Menurut Ng dan Tan (2003) dalam Eka Kartika (2013) Besaran *fee* inilah yang kadang membuat seseorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain auditor harus bisa memenuhi

tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Dari besarnya biaya audit yang diterima oleh auditor maka perusahaan menginginkan hasil audit yang berkualitas. Dengan biaya audit ini auditor akan merasa tertantang untuk mempertahankan sikap independensi dalam setiap pekerjaannya.

Adapun kabar tentang adanya Akuntan Publik palsu salah satunya datang dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dari paparannya pada satu kesempatan, OJK menyebutkan ada Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit, tapi ijin sebagai Akuntan Publik belum keluar. Fenomena adanya Akuntan Publik palsu tersebut, tegas Florus IAPI harus mengantisipasi dengan melakukan pengawasan oleh organ struktural organisasi yang disupervisi pengurus terpilih nanti. Prioritas lainnya yaitu perbaikan *fee* audit. Masih banyak praktek yang kurang adil seperti persaingan *fee* audit. Hal itu terjadi karena belum diatur secara jelas, sehingga *fee* audit bisa dibanting sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Sebagai gambaran suatu audit dengan *fee* audit senilai Rp. 50 juta, tapi ada Akuntan Publik agar bisa mendapatkan audit tersebut dengan mengajukan *fee* Rp. 10 juta dan dampaknya sudah bisa diperkirakan. Audit dikerjakan staf sehingga hasilnya sudah pasti tidak membanggakan bagi seorang auditor. Saat ini sudah ada aturan *fee* audit, sayangnya aturan tersebut belum diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya pengawasan dan tidak ada tindakan yang nyata dari pengurus IAPI yang lalu terhadap para pelanggar. Perlunya IAPI menjadi mediator antara Kantor Akuntan Publik perorangan, menengah dan

besar. Selama ini hanya berupa imbauan kepada Kantor Akuntan Publik perorangan untuk bergabung. (Florus Daeli, 2013)

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu beban kerja atau *workload*. Beban kerja yang tinggi akan menghasilkan suatu kualitas audit yang rendah, karena dengan beban kerja yang dialami auditor akan sangat menguras tenaga untuk berfikir dan waktu yang menjadi suatu tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Tabel 1.1

Rasio Jumlah Perikatan Per-Partner dan Per-Staf Audit Tahun 2009

		1	2	3	4	5	6
	Nama KAP	Jumlah Perikatan per-staf	Ranking (Kolom 1)	Jumlah staf per- partner	Ranking Kolom 3)	Jumlah Perikatan per- partner	Ranking (Kolom 5)
	A	3.2	1	41	7	132	2
	B	3.1	2	61	2	191	1
	C	2.5	3	34	9	86	4
	D	2.4	6	29	11	68	5
	E	2.4	4	22	13	54	8
	F	2.4	5	20	14	49	11
	G	2	7	17	16	33	14
	H	1.9	8	17	15	33	15
	I	1.5	9	27	12	41	12
	J	1.2	10	42	6	49	10
Big-4	K	1.1	12	85	1	90	3
	L	1.1	11	56	4	63	6
Big-4	M	1	14	59	3	57	7
Big-4	N	1	13	51	5	53	9
	O	1	15	33	10	31	16
Big-4	P	0.9	16	36	8	34	13

Sumber: Soedibyo (2010), Liswan dan Fitriani (2011)

Berdasarkan Laporan KAP ke PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) Departemen Keuangan tahun 2009, rasio jumlah klien dan jumlah staf auditor sangat bervariasi pada setiap KAP. Begitu pula rasio jumlah klien dengan jumlah partner. Ada KAP yang memiliki rasio sangat tinggi dan ada pula yang rendah. Rasio ini menunjukkan tingkat beban pekerjaan partner dan staf auditor (*workload*). Tabel 1 adalah hasil pengolahan data dari laporan KAP ke PPAJP Departemen Keuangan tahun 2009. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa KAP yang memiliki rasio jumlah perikatan per-*partner* yang sangat tinggi. Pada suatu KAP ada seorang *partner* yang harus menangani 191 perikatan per tahun. Dari data 16 besar KAP di Indonesia tahun 2009, rata-rata seorang *partner* bertanggung jawab atas 61 perikatan dalam satu tahun dan satu klien rata-rata ditangani oleh kurang dari 2 orang (1.79). Dapat dibayangkan bagaimana beratnya *workload* atau beban kerja seorang *partner* dan staf auditor (Liswan dan Fitriany, 2011)

Tingginya *workload* dapat menyebabkan kelelahan *disfunctional audit behavior* sehingga dapat menurunkan kemampuan auditor untuk melaporkan kesalahan atau melaporkan penyimpangan (Liswan dan Fitriany, 2011). Jadi jika seorang auditor mengalami beban kerja yang sangat tinggi dan adanya tekanan yang terus menerus maka kualitas audit yang dihasilkan akan rendah.

Dengan dibubarkannya KAP Arthur Anderson karena terlibat dalam kasus Enron, maka menyebabkan bertambahnya klien baru yang harus ditangani oleh KAP yang lain. Semakin bertambahnya klien yang ditangani maka semakin banyak pekerjaan yang harus ditangani oleh auditor tersebut. Akan tetapi jumlah

staf auditor dalam KAP terbatas, sehingga auditor akan merasa terbebani karena dengan banyaknya klien dia harus mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang sudah ditentukan.

Fungsi Komite audit juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas audit, karena komite audit merupakan suatu pengawasan bagi auditor internal dan auditor eksternal. Seorang auditor pun harus mengkomunikasikan hasil audit atau temuan kepada komite audit.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley yang di alih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008:112) komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan nonaudit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor.

Selain fenomena yang telah disebutkan di atas, ada juga kasus PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Untuk kasus PT. KAI pada tahun 2005, diumumkan bahwa PT. KAI mendapat keuntungan sebesar Rp 6,90 miliar. Padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 miliar. Komisaris PT. KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT. KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT. KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,

dan Komisaris PT. KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT. KAI tahun 2005 yang telah di audit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT. KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT. KAI selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara oleh manajemen PT. KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT. KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT. KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat mengenai laporan keuangan antara Komisaris dan auditor terjadi karena PT. KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT. KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Laporan Keuangan PT. KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya.

Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan, sehingga hasil audit laporan keuangan PT. KAI pun menjadi salah (Pratiwi Zone, 2014)

Pembentukan komite audit bukan hanya sekedar untuk suatu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga untuk kesadaran akan pentingnya pengawasan yang bersifat profesional untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat. Dengan adanya komite audit diharapkan agar seorang auditor dan komite audit dapat berkomunikasi secara baik, sehingga auditor dapat memberikan audit yang berkualitas.

Adanya biaya audit yang diberikan kepada auditor dari KAP tersebut diharapkan agar auditor dapat menjaga independensinya. Besar kecilnya suatu biaya audit yang diterima oleh auditor yaitu berdasarkan pada hasil audit yang dalam pengerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Jika seorang auditor dihadapkan dengan *workload* atau beban kerja audit yang tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut akan menurun, karena dengan pekerjaan yang banyak dan terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut itu akan mengurangi

kemampuan seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan adanya komite audit diharapkan komunikasi antara komite audit dan auditor eksternal dapat berjalan lancar sehingga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai **“PENGARUH BIAYA AUDIT, BEBAN KERJA AUDIT DAN FUNGSI KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana biaya audit pada 7 KAP di Bandung
2. Bagaimana beban kerja audit pada 7 KAP di Bandung
3. Bagaimana fungsi komite audit pada 7 KAP di Bandung
4. Bagaimana kualitas audit pada 7 KAP di Bandung
5. Bagaimana pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Bandung
6. Bagaimana pengaruh beban kerja audit terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Kota Bandung
7. Bagaimana pengaruh fungsi komite audit terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Kota Bandung

8. Bagaimana pengaruh biaya audit, beban kerja audit dan fungsi komite audit secara simultan terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui biaya audit pada 7 KAP di Bandung
2. Untuk mengetahui beban kerja audit pada 7 KAP di Bandung
3. Untuk mengetahui fungsi komite audit pada 7 KAP di Bandung
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada 7 KAP di Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh beban kerja audit terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Kota Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh fungsi komite audit terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Kota Bandung
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya audit, beban kerja audit dan fungsi komite audit secara simultan terhadap kualitas audit pada 7 KAP di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam studi yang membahas mengenai pemeriksaan keuangan khususnya mengenai topik biaya audit, beban kerja audit dan fungsi komite audit terhadap kualitas audit. Dan semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis,

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Pasundan Bandung dan agar menambah ilmu pengetahuan tentang topik tersebut.

2. Bagi auditor,

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga kualitas audit dengan sebaik mungkin, karena dengan kualitas audit akan dipercaya oleh masyarakat dan harus bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.

3. Bagi pihak lain,

Yaitu sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, Penulis melakukan penelitian pada KAP yang berada di kota Bandung. Adapun rencana waktu penelitian dimulai Bulan Agustus 2015 sampai dengan selesai.